

## ANALISIS DETERMINAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI MALUKU UTARA

Yohana Petronela D. Solapung<sup>1</sup>, I Wayan Priyana Agus Sudharma<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana

E-mail: [yohanapetronela28@gmail.com](mailto:yohanapetronela28@gmail.com)<sup>1</sup>

### Abstrak

Kesejahteraan masyarakat merupakan indikator penting yang dapat digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah. Tingkat kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan sosial seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), disparitas pendapatan, tingkat pengangguran, investasi, serta belanja modal pemerintah daerah. Provinsi Maluku Utara merupakan salah satu daerah yang mengalami perkembangan ekonomi yang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir, terutama dengan meningkatnya aktivitas industri dan investasi. Namun demikian, peningkatan aktivitas ekonomi tersebut belum tentu secara langsung mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata di seluruh kabupaten/kota. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh PDRB, disparitas pendapatan, pengangguran, investasi, dan belanja modal terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara selama periode 2019–2023. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dengan pendekatan data panel menggunakan model Fixed Effect Model (FEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel PDRB, disparitas pendapatan, pengangguran, investasi, dan belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara selama periode penelitian. Secara parsial, variabel PDRB dan disparitas pendapatan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, variabel investasi dan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, sedangkan pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi investasi dan alokasi belanja modal yang lebih efektif, serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata.

**Kata kunci:** Kesejahteraan Masyarakat, Produk Domestik Regional Bruto, Disparitas Pendapatan, Pengangguran, Investasi, Belanja Modal.

### Abstract

*Community welfare is an important indicator that can be used to assess the success of regional development. The level of community welfare is influenced by various economic and social factors such as Gross Regional Domestic Product (GRDP), income disparity, unemployment, investment, and regional government capital expenditure. North Maluku Province is one of the regions that has experienced rapid economic*

development in recent years, particularly due to the increasing industrial activities and investment. However, the increase in economic activities does not necessarily reflect an equal improvement in community welfare across all regencies and municipalities. This study aims to analyze the effect of GRDP, income disparity, unemployment, investment, and capital expenditure on community welfare in the regencies and municipalities of North Maluku Province during the period 2019–2023. The analytical method used in this study is a quantitative analysis with a panel data approach using the Fixed Effect Model (FEM). The results show that simultaneously GRDP, income disparity, unemployment, investment, and capital expenditure have a significant effect on community welfare in the regencies and municipalities of North Maluku Province during the study period. Partially, GRDP and income disparity have a positive but insignificant effect on community welfare. Meanwhile, investment and capital expenditure have a positive and significant effect on community welfare, while unemployment has a negative and significant effect on community welfare in the regencies and municipalities of North Maluku Province. Based on these findings, local governments are expected to improve the quality of economic growth through the optimization of investment and more effective allocation of capital expenditure, as well as expanding employment opportunities in order to enhance community welfare more evenly.

**Keywords:** community welfare, Gross Regional Domestic Product, income disparity, unemployment.

## PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang salah satunya dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator keberhasilan pembangunan yang mencakup dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak (Mulia & Saputra, 2020; Nurhartanto, 2021). Provinsi Maluku Utara memiliki karakteristik wilayah kepulauan dengan kondisi geografis yang kompleks sehingga memengaruhi pemerataan pembangunan, di mana beberapa daerah menjadi pusat pertambangan nikel yang mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi, sementara wilayah lainnya masih menghadapi keterbatasan akses infrastruktur dan layanan dasar. Meskipun pertumbuhan ekonomi provinsi ini tergolong sangat tinggi dan bahkan melampaui rata-rata nasional, peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari IPM masih berjalan relatif lambat dan belum merata antarwilayah. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan, di mana wilayah dengan aktivitas ekonomi tinggi tidak selalu memiliki tingkat pembangunan manusia yang lebih baik dibandingkan daerah yang berbasis sektor jasa dan perdagangan. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis berbagai faktor yang memengaruhi IPM di Provinsi Maluku Utara guna memahami hubungan antara pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ketimpangan pendapatan dipilih sebagai variabel dalam penelitian ini karena perbedaan distribusi pendapatan diyakini memiliki pengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, hal ini sejalan dengan temuan Zakaria (2021), yang menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat. Semakin besar jurang pendapatan antar kelompok, semakin rendah kemampuan kelompok rentan untuk mengakses layanan publik, termasuk pendidikan dan kesehatan, sehingga secara langsung menurunkan kualitas hidup masyarakat. Ketimpangan pendapatan yang tinggi juga sering berkaitan dengan tingkat pengangguran yang berbeda antar kelompok masyarakat, karena peluang kerja cenderung tidak merata dan akses terhadap lapangan pekerjaan lebih sulit bagi kelompok berpendapatan rendah, yang akhirnya juga akan berdampak pada kualitas hidup masyarakat.

Oleh karena itu, pengangguran menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan dalam analisis kesejahteraan masyarakat. Menurut Sukirno dalam penelitian Permana dan Arianti (2012), tingginya tingkat pengangguran mengurangi pendapatan masyarakat dan menurunkan standar hidup. Semakin tinggi angka pengangguran, semakin banyak masyarakat yang tidak memiliki pendapatan, sehingga pemenuhan kebutuhan pendidikan dan kesehatan menjadi tidak stabil. Hal ini terjadi karena pertumbuhan angkatan kerja tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan yang memadai. Kondisi ini semakin terasa ketika terjadi guncangan eksternal, seperti pandemi Covid-19, yang mempersempit lapangan kerja dan meningkatkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di berbagai provinsi di Indonesia.

Variabel pengangguran dipilih dalam penelitian ini karena kenaikan pengangguran akan menghambat akumulasi modal manusia dan memperbesar beban sosial ekonomi daerah, yang pada akhirnya menurunkan kualitas hidup yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Saputra dan Budyanra (2024) menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh negatif terhadap IPM. Penelitian tersebut menyatakan bahwa tingginya angka pengangguran mencerminkan kurang optimalnya penyerapan tenaga kerja oleh sektor produktif, sehingga berdampak pada penurunan daya beli masyarakat. Dengan demikian, pengaruh pengangguran terhadap kesejahteraan masyarakat menjadi penting untuk dianalisis. Namun, peningkatan kualitas hidup tidak hanya ditentukan oleh penyerapan tenaga kerja, melainkan juga oleh faktor lain yang mampu memperluas kesempatan ekonomi. Salah satunya adalah investasi, yang berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja baru, memperluas aktivitas produksi, serta mendorong peningkatan kualitas hidup di Provinsi Maluku Utara.

Variabel investasi dipilih dalam penelitian ini karena arus investasi diyakini memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik melalui penciptaan lapangan kerja maupun peningkatan produktivitas lokal. Hal ini sejalan dengan penelitian Wedananta & Purbadharmaja (2022) yang menunjukkan bahwa peningkatan investasi, baik PMDN maupun PMA, berkontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja berkualitas dan peningkatan produktivitas wilayah. Peneliti juga menekankan bahwa arus investasi sering kali mendorong modernisasi ekonomi lokal, termasuk pengembangan sektor pendidikan dan kesehatan swasta, yang pada akhirnya mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Terpusatnya investasi di wilayah tertentu, ditambah keterbatasan infrastruktur di beberapa kabupaten/kota tentu akan memperburuk ketimpangan pembangunan dan distribusi kesejahteraan antar wilayah. Oleh karena itu, pemerataan investasi serta pengembangan infrastruktur menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh kabupaten/kota di Maluku Utara, sehingga variabel belanja modal untuk pengembangan infrastruktur juga merupakan salah satu determinan penting kesejahteraan masyarakat dalam penelitian ini.

Variabel belanja modal dipilih dalam penelitian ini karena kondisi ketimpangan alokasi belanja modal menunjukkan bahwa tidak semua kabupaten/kota memiliki kemampuan fiskal dan prioritas pembangunan yang sama. Daerah dengan porsi belanja modal rendah cenderung tertinggal dalam penyediaan layanan dasar dan infrastruktur, seperti di Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu, yang masih menghadapi keterbatasan akses transportasi darat dan kesehatan. Hal ini menunjukkan pengeluaran pemerintah untuk pembangunan infrastruktur dasar dianggap memiliki pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan penelitian Khikmah & Sarfiah (2020) yang menemukan bahwa belanja modal pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Peneliti menekankan bahwa pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur dasar seperti sekolah, jalan, dan fasilitas kesehatan memperluas akses masyarakat terhadap layanan sosial, terutama di daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur. Oleh karena itu, belanja modal untuk pengembangan infrastruktur menjadi salah satu determinan penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat di Provinsi Maluku Utara.

Berdasarkan uraian tersebut, kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh sejumlah faktor ekonomi, meliputi PDRB, disparitas pendapatan, tingkat pengangguran, investasi, serta belanja modal pemerintah yang menopang infrastruktur dasar. Sejumlah penelitian empiris juga menunjukkan keterkaitan yang erat antara variabel-variabel tersebut dengan kualitas pembangunan manusia. Namun, sebagian besar penelitian sebelumnya umumnya masih menyoro

faktor tersebut secara terpisah, sehingga kajian yang menggabungkan kelima variabel dalam satu kerangka analisis masih relatif terbatas, sehingga belum mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai faktor-faktor tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut sekaligus memberikan kontribusi akademis maupun praktis dengan menganalisis secara panel pengaruh PDRB, gini rasio, tingkat pengangguran terbuka, investasi, dan belanja modal terhadap kesejahteraan masyarakat di 10 kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara dalam periode 2019–2023.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan menganalisis pengaruh beberapa faktor ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara. Variabel yang dianalisis meliputi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), disparitas pendapatan, tingkat pengangguran, investasi, dan belanja modal sebagai variabel independen, sedangkan kesejahteraan masyarakat yang diproksikan melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi variabel dependen. Penelitian dilakukan pada 10 kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara dengan periode pengamatan tahun 2019–2023. Pemilihan wilayah ini didasarkan pada kondisi kesejahteraan masyarakat yang masih relatif di bawah rata-rata nasional meskipun provinsi tersebut memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengkaji keterkaitan antara kinerja ekonomi daerah dan tingkat kesejahteraan masyarakat secara lebih komprehensif. (Sugiyono, 2018; Badan Pusat Statistik, 2023).

Data yang digunakan merupakan data sekunder kuantitatif yang diperoleh dari berbagai sumber resmi, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Data tersebut meliputi IPM sebagai indikator kesejahteraan masyarakat, PDRB atas dasar harga konstan, gini rasio sebagai ukuran disparitas pendapatan, tingkat pengangguran terbuka, realisasi investasi (PMDN dan PMA), serta belanja modal pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan data panel, yaitu kombinasi antara data *cross section* dari 10 kabupaten/kota dan data *time series* selama lima tahun, sehingga menghasilkan 50 observasi penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan terhadap publikasi resmi, laporan statistik, jurnal ilmiah, serta sumber literatur lain yang relevan dengan topik penelitian. (Kuncoro, 2009; Arikunto, 2010).

Analisis data dilakukan menggunakan regresi data panel untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap kesejahteraan masyarakat. Model regresi yang digunakan dirumuskan dengan IPM sebagai variabel dependen dan PDRB,

disparitas pendapatan, pengangguran, investasi, serta belanja modal sebagai variabel independen. Sebelum estimasi dilakukan, terlebih dahulu dipilih model panel yang paling sesuai melalui Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier guna menentukan apakah model terbaik adalah Pooled OLS, Fixed Effect Model, atau Random Effect Model. Selanjutnya dilakukan pengujian asumsi klasik seperti uji normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, heteroskedastisitas, serta ketergantungan antar unit cross-section untuk memastikan validitas model. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji F untuk melihat pengaruh variabel secara simultan, uji t untuk pengaruh parsial, serta analisis koefisien determinasi (Adjusted R<sup>2</sup>) untuk menilai kemampuan model dalam menjelaskan variasi kesejahteraan masyarakat di Provinsi Maluku Utara. (Gujarati & Porter, 2009; Ghozali, 2016; Wooldridge, 2018).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Lokasi Penelitian Provinsi Maluku Utara

#### Kondisi Geografis

Provinsi Maluku Utara merupakan provinsi di bagian timur Indonesia yang terbentuk pada 4 Oktober 1999 melalui Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 sebagai hasil pemekaran dari Provinsi Maluku, dengan luas wilayah sekitar 31.982,50 km<sup>2</sup> yang terdiri atas gugusan kepulauan dan berbatasan dengan Samudra Pasifik di utara, Laut Maluku di barat, Laut Seram di selatan, serta Laut Halmahera di timur. Secara administratif, provinsi ini terbagi menjadi delapan kabupaten dan dua kota, di mana Kabupaten Halmahera Selatan merupakan wilayah terluas, sedangkan Kota Ternate memiliki luas wilayah paling kecil.

**Gambar 1. Peta Provinsi Maluku Utara**



#### Kondisi Demografi

Provinsi Maluku Utara pada tahun 2024 memiliki jumlah penduduk sekitar 1.355.620 jiwa dengan komposisi laki-laki dan perempuan yang relatif seimbang, serta jumlah penduduk usia kerja mencapai 997.042 jiwa yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Distribusi penduduk antarwilayah cukup bervariasi, di mana Kabupaten Halmahera Selatan menjadi daerah dengan jumlah penduduk terbanyak,

sementara Kabupaten Pulau Taliabu memiliki jumlah penduduk paling sedikit, sedangkan Kota Ternate sebagai pusat perkotaan juga memiliki konsentrasi penduduk yang cukup besar.

**Kondisi Ekonomi**

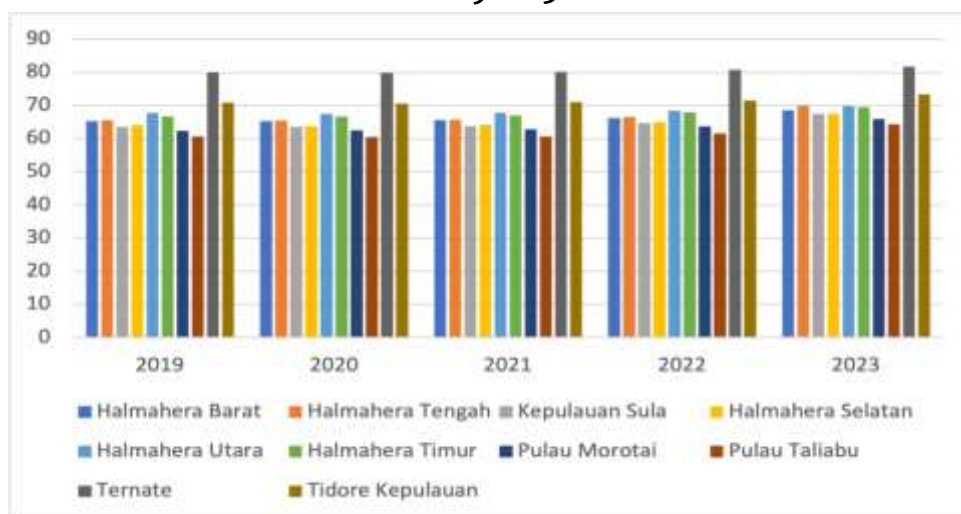
Perekonomian Provinsi Maluku Utara menunjukkan pertumbuhan yang sangat tinggi, mencapai 20,55% pada tahun 2024, terutama didorong oleh aktivitas pertambangan dan industri pengolahan nikel yang mendominasi struktur ekonomi daerah (BPS Maluku Utara, 2025). Meskipun demikian, ketergantungan yang besar pada sektor industri berbasis sumber daya alam menyebabkan pertumbuhan ekonomi provinsi ini cenderung fluktuatif dan rentan terhadap perubahan aktivitas industri serta harga komoditas. Dari sisi kesejahteraan, rata-rata pengeluaran per kapita masyarakat mengalami peningkatan, namun masih terdapat perbedaan yang cukup signifikan antarwilayah, di mana kota seperti Ternate memiliki tingkat pengeluaran lebih tinggi dibandingkan beberapa kabupaten yang masih bergantung pada sektor primer. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum sepenuhnya diikuti oleh pemerataan kesejahteraan, sehingga diperlukan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif agar manfaat pertumbuhan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.

**Deskripsi Variabel Penelitian**

**Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara**

Kesejahteraan masyarakat merupakan kondisi ketika masyarakat hidup makmur, sehat, dan mampu memenuhi kebutuhan hidup secara layak, yang dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berdasarkan tiga dimensi utama yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak, dengan nilai berkisar antara 0 hingga 100 di mana semakin tinggi IPM menunjukkan semakin baik tingkat kesejahteraan suatu daerah (BPS, 2020).

**Gambar 2. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Maluku Utara Tahun 2019-2023**

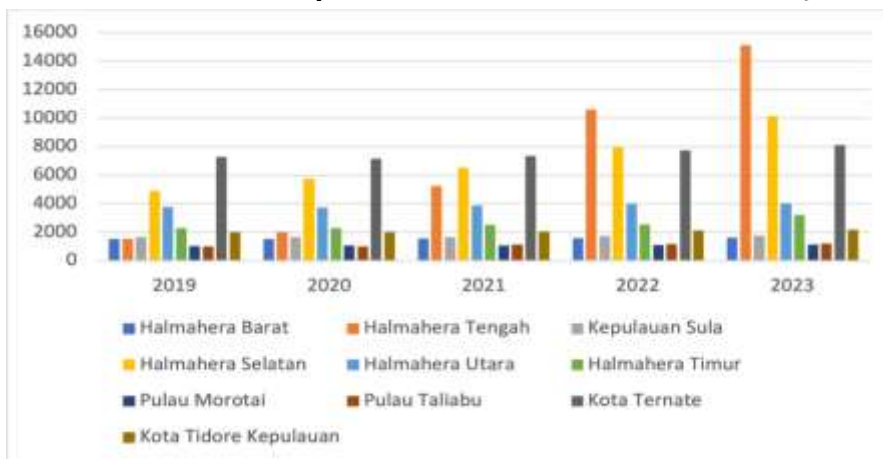


Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Maluku Utara menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun meskipun masih terdapat perbedaan capaian antarwilayah. Pada tahun 2023, Kota Ternate mencatat IPM tertinggi sebesar 81,79 karena didukung oleh perkembangan sektor jasa dan perdagangan serta akses pelayanan publik yang lebih baik, sementara Kabupaten Pulau Taliabu memiliki IPM terendah sebesar 64,31 akibat keterbatasan akses dan infrastruktur yang dipengaruhi oleh kondisi geografis yang terpencil.

**Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara**

Pertumbuhan ekonomi dapat diukur melalui nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan, yaitu nilai pasar barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu perekonomian selama periode tertentu, sehingga perubahan yang terjadi mencerminkan peningkatan produksi secara riil dan tidak dipengaruhi oleh inflasi (Sukirno, 2000).

**Gambar 3. PDRB Kabupaten/Kota Maluku Utara Tahun 2019-2023**



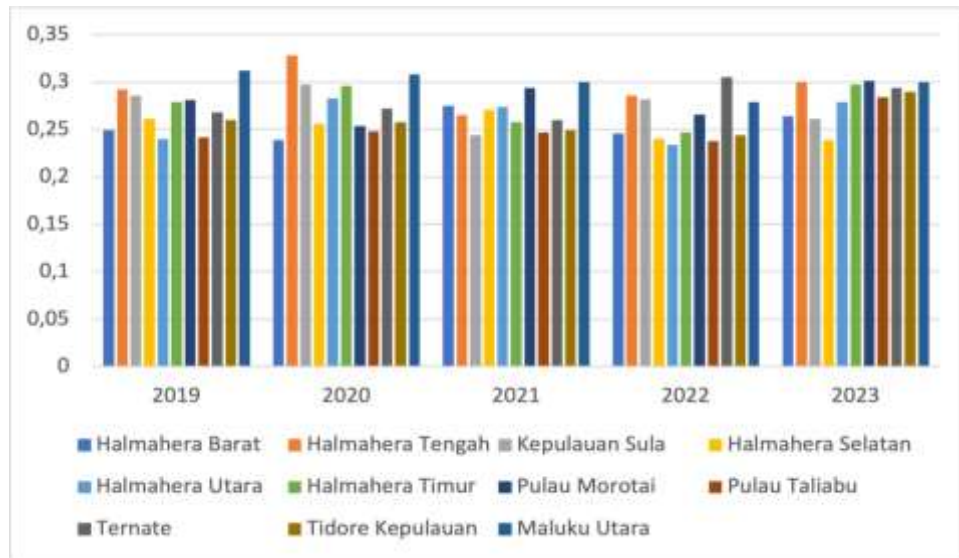
PDRB antarwilayah di Provinsi Maluku Utara menunjukkan dinamika pertumbuhan yang berbeda, di mana Kota Ternate memiliki tingkat PDRB yang relatif stabil karena didukung oleh sektor perdagangan, jasa, transportasi, dan aktivitas pemerintahan (BPS Kota Ternate, 2024). Sebaliknya, Kabupaten Halmahera Tengah mengalami lonjakan PDRB yang sangat signifikan pada 2023 akibat ekspansi industri hilirisasi nikel dan beroperasinya kawasan industri *Weda Bay Industrial Park* (IWIP). Perbedaan ini menunjukkan bahwa tingginya PDRB tidak selalu secara langsung mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat apabila pertumbuhan ekonomi belum diikuti oleh distribusi manfaat yang merata.

**Perkembangan Gini Rasio Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara**

Disparitas ekonomi merupakan kondisi ketimpangan yang mencolok antara kelompok masyarakat dalam hal distribusi pendapatan, kesejahteraan, pendidikan, dan kesempatan ekonomi yang dipengaruhi oleh perbedaan sumber daya, investasi, serta kualitas infrastruktur antarwilayah. Tingkat ketimpangan tersebut umumnya

diukur menggunakan Gini Rasio, yaitu indikator dengan nilai antara 0 hingga 1, di mana nilai yang mendekati 0 menunjukkan distribusi pendapatan yang lebih merata, sedangkan nilai yang mendekati 1 menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi.

**Gambar 4. Gini Rasio Kabupaten/Kota Maluku Utara Tahun 2019-2023**

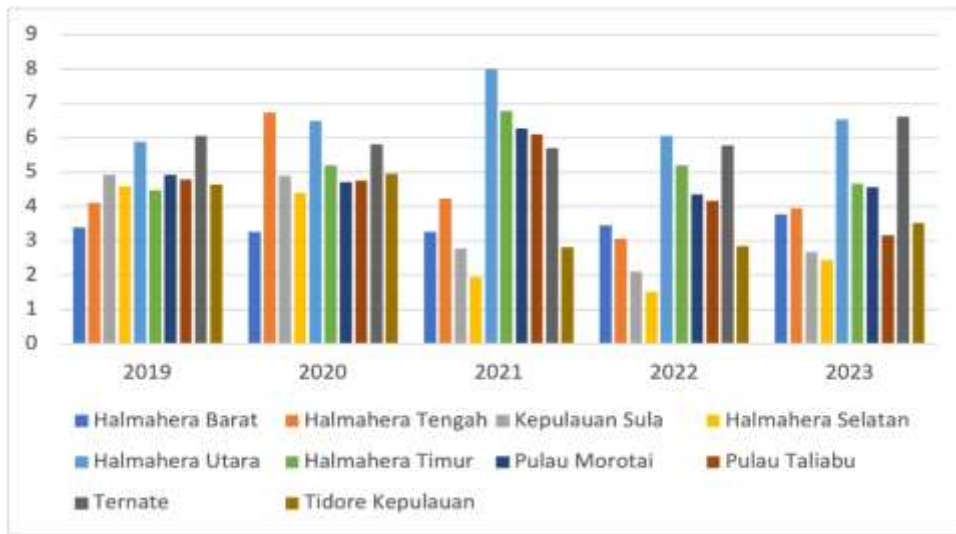


Secara umum, tingkat ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara menunjukkan pola fluktuatif dan belum memperlihatkan tren penurunan yang konsisten. Ketimpangan tertinggi tercatat di Kabupaten Pulau Morotai sebesar 0,30, sedangkan yang terendah berada di Kabupaten Halmahera Selatan sebesar 0,23, sementara pada tingkat provinsi Gini Rasio berada pada kisaran 0,279–0,312 selama periode 2022–2023 yang termasuk kategori ketimpangan sedang (DJPb, 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Maluku Utara masih relatif tinggi dibandingkan beberapa provinsi lain di kawasan timur Indonesia, sehingga berpotensi mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.

#### **Perkembangan Pengangguran Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara**

Pengangguran merupakan suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum memperolehnya. Tingkat pengangguran adalah angka yang menunjukkan berapa banyak dari jumlah angkatan kerja yang aktif mencari pekerjaan dan yang tidak bekerja. Tingkat pengangguran sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, karena semakin tinggi pengangguran, maka pendapatan masyarakat cenderung menurun, yang berdampak pada menurunnya daya beli dan kualitas hidup. Semakin tinggi angka pengangguran, semakin banyak masyarakat yang tidak memiliki pendapatan, sehingga pemenuhan kebutuhan pendidikan dan kesehatan menjadi tidak stabil.

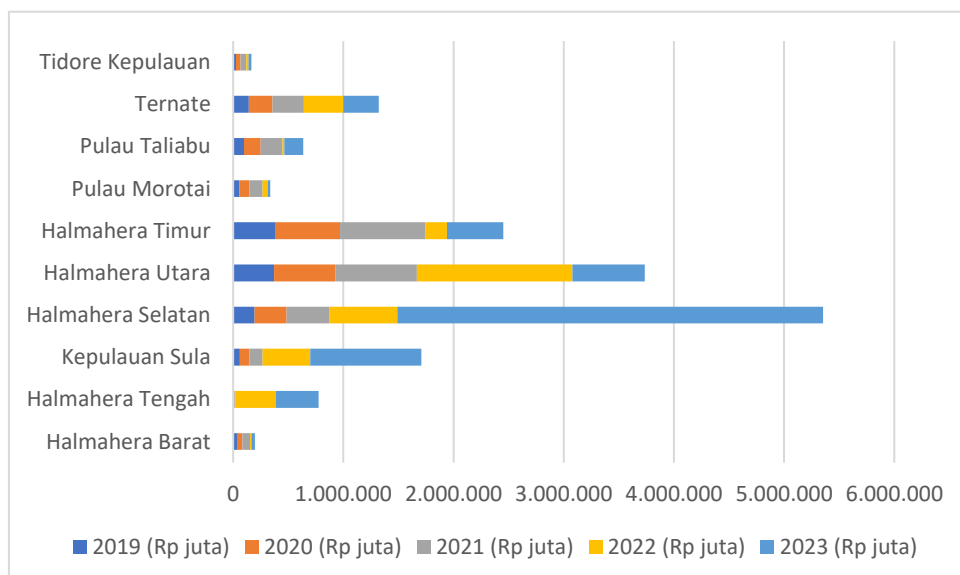
**Gambar 5. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Maluku Utara Tahun 2019-2023**



Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Maluku Utara menurun dari 5,15% pada 2020 menjadi 3,98% pada 2022 seiring pemulihan pascapandemi, namun kembali meningkat menjadi 4,31% pada 2023. Beberapa wilayah seperti Halmahera Utara dan Kota Ternate mencatat TPT relatif tinggi akibat keterbatasan penyerapan tenaga kerja dan ketidakseimbangan antara jumlah pencari kerja dan peluang kerja yang tersedia (BPS Provinsi Maluku Utara, 2023). Sebaliknya, Halmahera Selatan memiliki TPT terendah karena dominasi sektor pertambangan dan industri pengolahan nikel yang mampu menyerap tenaga kerja secara lebih besar dibandingkan wilayah lainnya (ANTARA News, 2025; Salauwe, 2025).

**Perkembangan Investasi Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara**

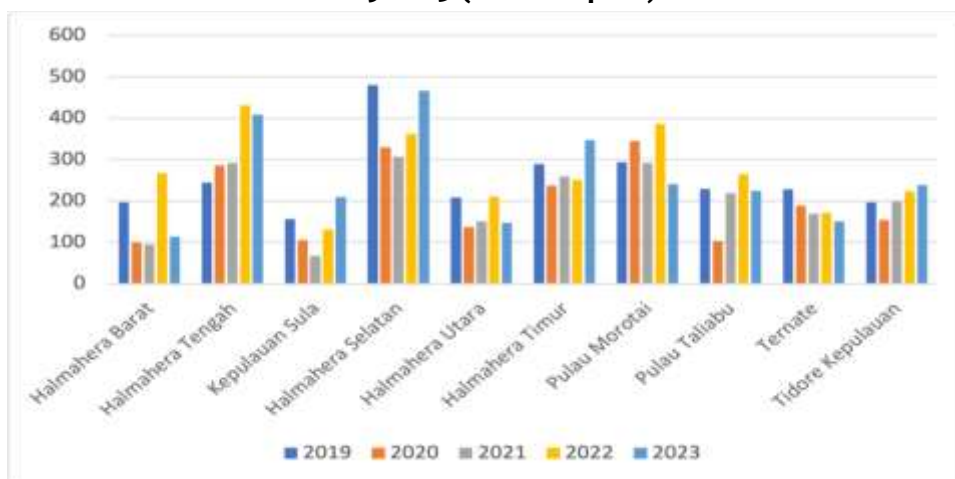
**Gambar 6. Realisasi Investasi Kabupaten/Kota Maluku Utara Tahun 2019-2023 (miliar rupiah)**



Investasi di kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara menunjukkan variasi yang cukup besar antarwilayah, dengan Halmahera Selatan dan Halmahera Tengah mencatat realisasi investasi tertinggi akibat ekspansi industri pertambangan dan smelter nikel serta pengembangan kawasan industri seperti Indonesia Weda Bay Industrial Park. Peningkatan investasi tersebut didorong oleh kebijakan hilirisasi mineral serta mulai beroperasinya beberapa proyek industri besar yang telah memasuki tahap produksi pada akhir 2023. Kondisi ini menunjukkan bahwa investasi memiliki peran penting dalam mendorong aktivitas ekonomi daerah, termasuk berkembangnya sektor pendukung seperti jasa, perdagangan, dan perikanan yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Kementerian Keuangan, 2021).

**Perkembangan Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara**

**Gambar 7. Realisasi Belanja Modal APBD Kabupaten/Kota Maluku Utara Tahun 2019-2023 (miliar rupiah)**



Belanja modal untuk pembangunan infrastruktur di kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara selama periode 2019–2023 menunjukkan fluktuasi antarwilayah yang mencerminkan perbedaan prioritas pembangunan dan kapasitas fiskal daerah. Halmahera Tengah dan Halmahera Selatan mencatat alokasi belanja modal relatif tinggi, terutama pada 2022–2023, seiring meningkatnya aktivitas industri dan pertambangan serta pembangunan fasilitas pendukung hilirisasi mineral. Peningkatan belanja modal tersebut berperan penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik yang pada akhirnya berpotensi meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

**Hasil Analisis Terhadap Data Penelitian**  
**Hasil Uji Statistik Deskriptif**

**Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif**

	IPM (Y)	PDRB (X <sub>1</sub> )	Gini Rasio (X <sub>2</sub> )	Pengangguran (X <sub>3</sub> )	Investasi (X <sub>4</sub> )	Belanja Modal (X <sub>5</sub> )
Mean	67,24	3589,952	0,26	4,54	33057,2	214,41
Median	65,82	2149,005	0,26	4,61	160211,8	214,47
Maximum	81,35	10618,78	0,32	8,01	3862119,0	480,54
Minimum	60,48	989,6300	0,23	1,51	338,9	196,6
Std. Dev.	5.22	3872,479	0,02	1,45	588060.3	108,72
Observation	50	50	50	50	50	50

Sumber: Hasil Olahan Data Eviews, 2025

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, penelitian ini menggunakan 50 observasi yang terdiri dari 10 data *cross section* (kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara) dan 5 data *time series* pada periode 2019–2023. Variabel IPM memiliki rata-rata 67,24 dengan rentang 60,48–81,35 dan menunjukkan adanya variasi pembangunan manusia antarwilayah, sementara PDRB dan investasi memperlihatkan standar deviasi yang sangat besar dibandingkan nilai rata-ratanya, yang mengindikasikan ketimpangan ekonomi dan distribusi investasi antar kabupaten/kota. Gini Rasio memiliki rata-rata 0,26 dengan standar deviasi kecil sehingga menunjukkan ketimpangan pendapatan yang relatif stabil, sedangkan tingkat pengangguran terbuka rata-rata 4,54% dengan variasi cukup tinggi antarwilayah. Secara keseluruhan, hasil deskriptif menunjukkan adanya perbedaan karakteristik ekonomi dan sosial antar kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara, sehingga diperlukan analisis regresi data panel untuk menguji pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap IPM secara empiris.

**Hasil Uji Pemilihan Model Estimasi Regresi Data Panel**

**1) Uji Chow**

**Tabel 2. Hasil Uji Chow**

Effects Test	Statistic	d.f	Prob.
Cross-section F	190.33	(9,35)	0.0000
Cross-section Chi-square	195.54	9	0.0000

Sumber: Hasil Olahan Data Eviews, 2025

Berdasarkan hasil uji Chow diperoleh nilai probabilitas *cross section chi-square* sebesar 0.0000 lebih kecil dari 0,05 sehingga  $H_0$  ditolak. Hal ini mengindikasikan bahwa *Fixed Effect Model* lebih tepat digunakan. Namun demikian, karena uji Chow tidak mempertimbangkan kemungkinan adanya efek acak, maka diperlukan uji Hausman untuk menentukan model yang lebih sesuai adalah *Fixed Effect Model* atau *Random Effect*.

## 2) Uji Hausman

**Tabel 3. Hasil Uji Hausman**

Test Summary	Chi-sq. Statistic	Chi-sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	37.31	5	0.0000

Sumber: Hasil Olahan Data Eviews, 2025

Berdasarkan hasil uji Hausman diperoleh nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 sehingga  $H_0$  ditolak dan model yang tepat digunakan adalah *Fixed Effect Model* (FEM), karena terdapat perbedaan signifikan antara estimasi FEM dan *Random Effect Model* (REM). Selain itu, uji *Lagrange Multiplier* (LM) tidak dilakukan karena uji Chow dan Hausman telah menunjukkan bahwa FEM lebih sesuai digunakan dalam penelitian ini untuk mengakomodasi perbedaan karakteristik antar daerah.

### Analisis Regresi Data Panel

**Tabel 4. Analisis Regresi Data Panel**

Variable	Coefficient	t-Statistic	Prob.
C	63.60598	27.22541	0.000
PDRB ( $X_1$ )	4.96E-05	1.256052	0.2174
Gini Rasio ( $X_2$ )	14.97363	1.503249	0.1417
Pengangguran ( $X_3$ )	-0.304540	-4.487133	0.0001
Investasi ( $X_4$ )	4.00E-07	3.861440	0.0005
Belanja Modal ( $X_5$ )	0.003241	3.460129	0.0014

Sumber: Hasil Olahan Data Eviews

Model regresi dalam penelitian ini menunjukkan hubungan antara IPM dengan PDRB, Gini Rasio, pengangguran, investasi, dan belanja modal. Nilai konstanta sebesar 63,60598 menunjukkan bahwa apabila seluruh variabel independen bernilai nol, maka IPM diperkirakan sebesar 63,61 poin. Hasil estimasi menunjukkan bahwa PDRB, Gini Rasio, investasi, dan belanja modal memiliki koefisien positif, sedangkan pengangguran memiliki koefisien negatif terhadap IPM. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi, investasi, dan belanja modal cenderung meningkatkan IPM, sementara peningkatan pengangguran berpotensi menurunkan IPM dengan asumsi variabel lain tetap.

### Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik bertujuan untuk memastikan model regresi memenuhi asumsi dasar analisis, namun dalam data panel umumnya hanya dilakukan uji heteroskedastisitas dan multikolinearitas, karena uji autokorelasi dan normalitas tidak selalu diwajibkan, terutama ketika model yang digunakan adalah *common effect* atau *fixed effect* (Basuki, 2015; Napitupulu et al., 2021).

### 1. Uji Multikolinearitas

**Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas**

	Correlation				
	Pertumbuhan Ekonomi (X <sub>1</sub> )	Gini Rasio (X <sub>2</sub> )	Pengangguran (X <sub>3</sub> )	Investasi (X <sub>4</sub> )	Belanja Modal (X <sub>5</sub> )
PDRB (X <sub>1</sub> )	1.000000	0.099685	-0.015454	0.408253	0.254780
Gini Rasio (X <sub>2</sub> )	0.099685	1.000000	0.251663	-0.202278	0.001023
Pengangguran (X <sub>3</sub> )	-0.015454	0.251663	1.000000	-0.071013	-0.066366
Investasi (X <sub>4</sub> )	0.408253	-0.202278	-0.071013	1.000000	0.274723
Belanja Modal (X <sub>5</sub> )	0.254780	0.001023	-0.066366	0.274723	1.000000

Sumber: Hasil Olahan Data Eviews, 2025

Berdasarkan hasil pengujian multikolinearitas terlihat bahwa seluruh pasangan variabel, nilai koefisien korelasi memiliki nilai korelasi yang berada di bawah batas multikolinearitas (0,90), sehingga dapat disimpulkan bahwa data per variabel tidak terindikasi adanya multikolinearitas serius atau lolos uji multikolinearitas.

### 2. Uji Autokorelasi

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan EViews, diperoleh nilai Durbin–Watson (DW) sebesar 1,140496. Menurut kriteria Ghazali (2012), nilai DW berada pada rentang 1,5 – 2,5, yang menunjukkan bahwa model regresi bebas dari autokorelasi, baik autokorelasi positif maupun negatif. Nilai DW sebesar 1,203320 yang berada di bawah angka 2 mengindikasikan adanya autokorelasi positif pada model regresi. Untuk mengatasi potensi permasalahan autokorelasi, penelitian ini menggunakan *White cross-section standard errors* sehingga estimasi koefisien regresi yang dihasilkan tetap bersifat konsisten dan reliabel. Dengan demikian, meskipun terdapat indikasi autokorelasi, model regresi yang digunakan tetap layak untuk dianalisis lebih lanjut pada tahap interpretasi hasil estimasi.

### 3. Uji Heteroskedastisitas

**Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.560635	0.592733	-0.945847	0.3507
PDRB (X <sub>1</sub> )	3.43E-05	2.52E-05	1.360269	0.1824
Gini Rasio (X <sub>2</sub> )	4.454407	2.117030	2.576443	0.0144
Pengangguran (X <sub>3</sub> )	-0.110989	0.042201	-2.629997	0.0126
Investasi (X <sub>4</sub> )	-7.26E-08	8.53E-08	-0.850909	0.4006
Belanja Modal (X <sub>5</sub> )	-2.13E-06	4.44E-06	-0.478630	0.6352

Sumber: Hasil Olahan Data Eviews, 2025

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas, variabel disparitas pendapatan dan pengangguran memiliki nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, sehingga mengindikasikan adanya heteroskedastisitas dalam model regresi. Kondisi ini

menunjukkan bahwa model mengalami pelanggaran asumsi homoskedastisitas yang umum terjadi pada data panel akibat perbedaan karakteristik antar unit *cross-section*. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode *White cross-section standard errors* untuk memperoleh estimator varians yang konsisten sehingga hasil estimasi tetap reliabel dan pengujian statistik dapat digunakan secara valid (Gujarati & Porter, 2009; Wooldridge, 2010).

### Hasil Uji Hipotesis

#### Hasil Uji Koefisien Determinasi $R^2$

**Tabel 7. Hasil Koefisien Determinasi  $R^2$**

R-square	0.9902
Adjusted R-squared	0.9862
S.E of regression	0.6125
Sum squared resid	13.13372
Log likelihood	-37.5259
F-statistic	252.6085
Prob(F-statistic)	0.0000

Sumber: Hasil Olahan Data Eviews, 2025

Nilai *adjusted R<sup>2</sup>* sebesar 0,98 menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi, disparitas pendapatan, pengangguran, investasi, dan belanja modal mampu menjelaskan variasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 98%, sedangkan sisanya 2% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian. Nilai koefisien determinasi yang tinggi menunjukkan bahwa model penelitian memiliki kemampuan yang sangat kuat dalam menjelaskan variasi IPM di kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara. Namun, dalam analisis data panel dengan pendekatan *fixed effect*, tingginya nilai tersebut juga dapat dipengaruhi oleh perbedaan karakteristik sosial, ekonomi, dan struktur wilayah antar daerah yang relatif tetap.

### Hasil Uji Statistik Secara Simultan

**Tabel 8. Hasil Uji Statistik Secara Simultan (Uji F)**

R-square	0.9902
Adjusted R-squared	0.9862
S.E of regression	0.6125
Sum squared resid	13.13372
Log likelihood	-37.5259
F-statistic	252.6085
Prob(F-statistic)	0.0000

Sumber: Hasil Olahan Data Eviews, 2025

Pengujian hipotesis simultan dilakukan untuk mengetahui pengaruh PDRB, disparitas pendapatan, pengangguran, investasi, dan belanja modal terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara dengan taraf nyata 5% dan tingkat kepercayaan 95%. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai  $F_{hitung}$  sebesar 252,6085 lebih besar dari  $F_{tabel}$  2,43 dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ , sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Dengan demikian, seluruh variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, sehingga model regresi layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

### **Hasil Uji Statistik Secara Parsial (Uji T)**

Hasil uji parsial yang menggambarkan pengaruh masing-masing variabel PDRB ( $X_1$ ), disparitas pendapatan ( $X_2$ ), pengangguran ( $X_3$ ), investasi ( $X_4$ ), dan belanja modal ( $X_5$ ) terhadap variabel kesejahteraan masyarakat ( $Y$ ) kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara tahun 2019-2023, sebagai berikut.

#### **1) Pengujian pengaruh PDRB ( $X_1$ ) terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara ( $Y$ ).**

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh PDRB terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara dengan taraf nyata 5% dan tingkat kepercayaan 95% menggunakan uji satu sisi kanan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai  $t_{hitung}$  sebesar 1,256 lebih kecil dari  $t_{tabel}$  1,680 dengan nilai signifikansi  $0,217 > 0,05$ , sehingga  $H_0$  diterima. Dengan demikian, PDRB secara parsial berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara.

#### **2) Pengujian pengaruh disparitas pendapatan ( $X_2$ ) terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara ( $Y$ ).**

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh disparitas pendapatan terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara dengan taraf nyata 5% dan tingkat kepercayaan 95% menggunakan uji satu sisi kiri. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai  $t_{hitung}$  sebesar 1,503 lebih besar dari  $t_{tabel}$  -1,680 dengan nilai signifikansi  $0,141 > 0,05$ , sehingga  $H_0$  diterima. Dengan demikian, disparitas pendapatan secara parsial tidak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara.

**3) Pengujian pengaruh pengangguran ( $X_3$ ) terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara (Y).**

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh pengangguran terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara dengan taraf nyata 5% dan tingkat kepercayaan 95% menggunakan uji satu sisi kiri. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $-4,487$  lebih kecil dari  $t_{tabel} -1,680$  dengan nilai signifikansi  $0,0001 < 0,05$ , sehingga  $H_0$  ditolak. Dengan demikian, pengangguran secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara.

**4) Pengujian pengaruh investasi ( $X_4$ ) terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara (Y).**

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh investasi terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara dengan taraf nyata 5% dan tingkat kepercayaan 95% menggunakan uji satu sisi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $3,861$  lebih besar dari  $t_{tabel} 1,680$  dengan nilai signifikansi  $0,0005 < 0,05$ , sehingga  $H_0$  ditolak. Dengan demikian, investasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara.

**5) Pengujian pengaruh belanja modal ( $X_5$ ) terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara (Y).**

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh belanja modal terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara dengan taraf nyata 5% dan tingkat kepercayaan 95% menggunakan uji satu sisi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $3,460$  lebih besar dari  $t_{tabel} 1,680$  dengan nilai signifikansi  $0,0014 < 0,05$ , sehingga  $H_0$  ditolak. Dengan demikian, belanja modal secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara.

### **Pembahasan Hasil Penelitian**

#### **Pengaruh PDRB Secara Parsial Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara**

Berdasarkan hasil analisis, variabel PDRB memiliki koefisien positif sebesar  $0,0000496$  namun tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi daerah belum secara langsung diikuti oleh peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat. Kondisi tersebut terjadi karena pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara lebih banyak ditopang oleh sektor pertambangan dan industri

pengolahan yang kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja dan pemerataan pendapatan masih terbatas. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu berdampak pada pembangunan manusia apabila tidak diikuti oleh pemerataan kesejahteraan dan akses layanan dasar (BPS Maluku Utara, 2023; Murniati & Hasri, 2022).

#### **Pengaruh Disparitas Pendapatan Secara Parsial Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara**

Berdasarkan hasil analisis, variabel disparitas pendapatan memiliki koefisien positif sebesar 14,97369 dan tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Provinsi Maluku Utara belum cukup kuat secara statistik dalam menjelaskan perbedaan capaian IPM antar kabupaten/kota. Kondisi tersebut sejalan dengan hipotesis Kuznets yang menyatakan bahwa pada tahap awal pembangunan ekonomi, ketimpangan pendapatan dapat meningkat tanpa langsung menghambat peningkatan pembangunan manusia (Kuznets, 1955 dalam Kuncoro, 2000). Temuan ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa rasio gini tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap IPM karena akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masih dapat mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat (Lamanele et al., 2024; Ramadhan & Pertiwi, 2025).

#### **Pengaruh Pengangguran Secara Parsial Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara**

Berdasarkan hasil analisis, variabel pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan koefisien  $-0,304540$ , yang menunjukkan bahwa peningkatan pengangguran dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat. Tingginya pengangguran mengurangi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Temuan ini sejalan dengan *Okun's Law* yang menyatakan adanya hubungan negatif antara tingkat pengangguran dan pertumbuhan output, sehingga tingginya pengangguran mencerminkan pemanfaatan tenaga kerja yang tidak efisien dan pembangunan yang kurang inklusif. Hasil ini juga konsisten dengan teori pembangunan ekonomi yang menyatakan bahwa tingginya pengangguran dapat menurunkan pendapatan rumah tangga dan kualitas sumber daya manusia, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan IPM (Todaro & Smith, 2015; Saputra & Budyanra, 2024).

#### **Pengaruh Investasi Secara Parsial Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara**

Berdasarkan hasil analisis, variabel investasi memiliki koefisien positif sebesar  $0,0000004$  dengan nilai probabilitas  $0,0005 (<0,05)$ , sehingga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di

kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan investasi berkontribusi dalam mendorong peningkatan kualitas pembangunan manusia, terutama melalui perkembangan aktivitas ekonomi di sektor industri, perdagangan, jasa, dan konstruksi. Temuan ini sejalan dengan teori investasi Harrod–Domar yang menyatakan bahwa pembentukan modal melalui investasi dapat meningkatkan kapasitas produksi serta menimbulkan multiplier effect bagi sektor ekonomi lainnya. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa investasi yang berkembang secara efektif dan inklusif dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong peningkatan IPM.

#### **Pengaruh Belanja Modal Secara Parsial Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara**

Belanja modal memiliki koefisien positif sebesar 0,003241 dan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan belanja modal pemerintah daerah berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusia melalui penyediaan infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan fasilitas publik lainnya. Kondisi ini terlihat pada beberapa kabupaten seperti Halmahera Tengah dan Halmahera Selatan yang memiliki alokasi belanja modal relatif tinggi untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan aktivitas ekonomi daerah. Temuan ini sejalan dengan teori Human Capital serta penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa peningkatan belanja modal pemerintah dapat mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia dan IPM.

#### **SIMPULAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut

- 1) Berdasarkan hasil analisis penelitian, diperoleh bahwa secara simultan variabel PDRB, disparitas pendapatan, pengangguran, investasi, dan belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara selama periode 2019 – 2023.
- 2) Secara parsial, PDRB dan disparitas pendapatan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara. Investasi dan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara. Pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adriani. (2014). Gizi dan Kesehatan Balita (Peranan Mikro Zinc pada pertumbuhan balita). Kencana.
- Aji, M. H., Imsar, I., & Daulay, A. N. (2024). The Impact of Investment, Inflation, and Productive Zakat on the Welfare of People in Medan. *Quantitative Economics and Management Studies*, 5(5), 995-1004.
- Alesina dan Rodrik. (2010). Analisis Keterkaitan Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan Dan Pengentasan Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2000–2010. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(2).
- Arifin, Z., Maipita, I., & Hutasuhut, S. (2020). The Effect of Capital Expenditure and Economic Growth on the Human Development Index of the District City in North Sumatera. *Advances in Social Sciences Research Journal*, 7(1), 585-594.
- Awandari, L. P. P., & Indrajaya, I. G. B. (2016). Pengaruh infrastruktur, investasi, dan pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat melalui kesempatan kerja. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 5(12), 165388.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara. (2023). Analisis isu terkini Provinsi Maluku Utara 2023.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara. (2024). Analisis isu terkini Provinsi Maluku Utara, Volume 6 (No. Katalog 9101009.82, No. Publikasi 82000.24035). Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara. (2023). Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Maluku Utara 2023, Volume 9. Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara. (2022). Provinsi Maluku Utara dalam angka 2022 (No. Publikasi 82000.2202, No. Katalog 1102001.82). Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara. (2024). Provinsi Maluku Utara dalam Angka 2024. BPS.
- BPS Kota Ternate. (2024). *Gross Regional Domestic Product of Ternate Municipality by Industry 2019–2023*. BPS Kota Ternate.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara. Indeks pembangunan manusia menurut kabupaten/kota.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara. (2023). Laju pertumbuhan produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan 2010 menurut kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara (persen).
- Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara. (2023). Tingkat pengangguran terbuka (TPT) kabupaten/kota (persen).
- Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara. (2023). Gini rasio menurut kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara.
- Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2023). Perkembangan realisasi investasi berdasarkan kabupaten-kota.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku. (2023). Gini Ratio Maret 2023 tercatat sebesar 0,288. BPS Maluku.

- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah. (2023). Gini Ratio Maret 2023 tercatat sebesar 0,304. BPS Sulawesi Tengah.
- Yoga, G. A. D. M. (2024). Determinan Kesejahteraan Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Provinsi Bali. *Jurnal Ekuilnomi*, 6(2), 170-181.
- Zulfalinda, A., & Damayanti, A. (2022). *Analysis of the Effect of Open Unemployment Rate, Poverty Rate, and Economic Growth on the Human Development Index (HDI)*. *Journal of Business Management and Economic Development*.